

OPTIMALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM SATLINMAS GUNA MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN TAKALAR

Wahid Rahmat Hidayat Muhammad Hasim

NPP. 29.1277

Asdaf Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email:

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author's motivation for writing the title is that there are still issues of disturbance of peace and public order in the Takalar Regency's village/region. As a result, the Community Protection Unit bears responsibility for the current issues. **Purpose:** using Ermaya Suradinata's theory of peace and order, which is separated into two dimensions, namely peace and order, to describe the efforts that the government is doing to achieve its goal, namely to enhance public peace and order. **Method:** The method utilized in this study is a qualitative research methodology that uses empirical facts to illustrate the flow of the research process. Observation, interviews, and documentation approaches were used to obtain data. **Result:** The obstacles encountered are discussed in the results, which include a limited budget for supporting facilities and infrastructure for field personnel, overlapping policies made by regional heads because they want to form community safety institutions, and the lack of existence of Satlinmas due to their lack of uniforms. **Conclusion:** The engagement of Satpol PP as the supervisor of the Satlinmas to increase the competency of Satlinmas personnel in terms of keeping peace and public order in Takalar Regency is one of the government's efforts to overcome all of that.

Keywords: *Optimization, Satlinmas, Peace, Order, Satpol PP*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Latar belakang penulis mengambil judul diatas adalah masih adanya permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi disekitar wilayah desa/wilayah di Kabupaten Takalar. Maka dari itu yang menjadi tanggung jawab atas permasalahan yang ada yakni Satuan Perlindungan Masyarakat. **Tujuan:** Untuk mewujudkan hal itu semua maka diperlukan peran serta masyarakat untuk turut serta kedalam satlinmas melalui peningkatan peran serta masyarakat dilihat dari eksistensi satlinmas itu sendiri. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan penelitian kualitatif untuk menjelaskan alur dari proses penelitian ini melalui fakta empiris. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil:** Hasil dan pembahasan yang diperoleh yaitu kendala yang dihadapi yakni tercakup dari keterbatasan anggaran untuk penunjang sarana dan prasarana personil dilapangan, tumpang tindihnya kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah karena ingin membentuk lembaga pengaman masyarakat dan kurangnya eksistensi satlinmas karena belum mempunyai

seragam. **Kesimpulan:** upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi itu semua yaitu keterlibatan Satpol PP sebagai pembina satlinmas untuk meningkatkan kompetensi personil satlinmas dalam hal penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Takalar.

Kata Kunci: *Optimalisasi, Satlinmas, Ketentraman, Ketertiban, Satpol PP*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pergeseran paradigma dari generasi milenial ke generasi Z dewasa ini menimbulkan begitu banyaknya perkembangan sosial dimasyarakat. Dari yang buta akan teknologi hingga melek teknologi dihadapkan dengan berbagai persoalan demi kemajuan pembangunan wilayah. Entitas masyarakat yang plural dengan berbagai latar belakang seakan menjadi hal positif bagi pembangunan yang ada didaerah. Benar bahwa masyarakat plural adalah sebuah realita kehidupan manusia sehingga terbentuk masyarakat yang terbuka atau (*open society*). Sejak saat itu eksistensi masyarakat ada karena perkembangan pluralitas dari masyarakat. Sejak zaman barbar hingga saat ini sejarah mencatat kehidupan manusia ditentukan oleh sebuah keyakinan yakni hidup nyaman dalam keberagaman, dan keamanan. Untuk terciptanya pembangunan dari pluralitas masyarakat factor factor penting mencapai tujuan pembangunan salah satunya adalah factor keamanan. Keamanan adalah sub bagian dari beberapa factor pencapaian pembangunan suatu wilayah. Walaupun hanya berstatus sub bagian, factor keamanan ini menjadi penting bagi kemajuan pembangunan suatu wilayah.

Ketahanan untuk mempertahankan proteksi atau ancaman gangguan ketentraman dan ketertiban dari luar sebagaimana dikemukakan Kuncoro, demi percepatan pembangunan suatu daerah sangatlah vital diorientasikan kepada masyarakat sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Bahwa dapat disimpulkan tujuan otonomi daerah adalah utnuk percepatan pembangunan. pun juga peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dapat diukur dengan melihat keberhasilan terwujudnya kehidupan yang adil dan baik dalam hal pendapatan karena majunya pembangunan daerah tadi dan terciptanya rasa aman sebagai proteksi untuk kemajuan pembangunan itu sendiri. Otonomi daerah yang memiliki prinsip otonomi seluas-luasnya yang berarti kewenangan daerah untuk mengurus urusan pemerintah daerah diluar yang menjadi urusan perundang-undangan. Maka dari itu daerah mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan memberikan pelayanan, peran serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat haruslah tercipta ketentraman dan ketertiban. Ketentraman dan ketertiban tercipta dengan tidak adanya gangguan trantibum di wilayah tersebut.

Pencapaian terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri yang bermukim diwilayah itu untuk menjaga dari gangguan ketentraman, ketertiban umum, dan gangguan lainnya yang dapat mencederai taraf kebahagiaan masyarakat dari rasa tentram dan damai. Rasa tentram dan damai tercipta karena adanya partisipasi langsung oleh masyarakat.

Konfirmasi awal yang penulis lakukan via chat whatsapp oleh Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Takalar ibu Andi Zulhaedah, S.STP., M. Si beliau mengatakan bahwa kendala dilapangan dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum yaitu belum adanya peraturan daerah mengenai ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum. Kemudian terkait pembinaan kepada masyarakat yang telah menjadi satuan keamanan lingkungan masyarakat belum

dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran. Hal ini menyebabkan tingkat pengetahuan Satuan Perlindungan Masyarakat untuk melakukan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Takalar masih sangat minim. Sehingga masih banyaknya kejadian yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Dari data yang diperoleh di atas pun juga konfirmasi awal yang penulis lakukan dapat diketahui penyebab masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Takalar karena masih kurangnya jumlah personil Satuan Perlindungan Masyarakat karena faktor anggaran terkait pembinaan pengetahuan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban, sehingga masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban dimasyarakat yang memiliki dampak seperti kejadian gangguan yang telah dijabarkan penulis antara lain seperti dapat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, balapan liar di malam hari yang mengganggu jam istirahat masyarakat karena suara bising knalpot, minuman beralkohol yang dapat menyebabkan terjadinya tindak kriminal. Dan lain sebagainya.

Masalah ketentraman dan ketertiban ini memang sudah berakar dari dulu di masyarakat sehingga tugas masyarakat disini adalah berperan serta aktif dalam menangani gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayahnya. Namun peran masyarakat ini perlu didukung oleh upaya yang dilakukan pemerintah sebagai *backup* kepada masyarakat yang ada di wilayahnya, bagaimanapun pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap wilayah teritorial tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Masalah ketentraman dan ketertiban umum menjadi yang masih menjadi polemik di kehidupan bermasyarakat. Terkhusus di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan masih banyaknya keadaan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat seperti adanya ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa), Kebisingan akibat tidak tertibnya masyarakat dalam kehidupan sosial, keresahan oleh anak punk/ gepeng, tumpukan material bangunan yang mengganggu keadaan di sekitar rumah warga, dan yang masih marak nya terjadi yakni balapan liar dan penyalahgunaan minuman beralkohol.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Wulan Kinasih dan Joko Pramono, 2018 berjudul *Optimalisasi Peran Satlinmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta*. Dari hasil penelitian oleh peneliti tersebut bahwa, optimalisasi peran satlinmas berupaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum lingkungan masing-masing sesuai dengan peran satlinmas itu sendiri yang tertuang dalam permendagri nomer 84 tahun 2014 dan peraturan walikota Surakarta no.58 A tahun 12 yakni membantu penanggulangan tanggap bencana, membantu Satpol PP untuk melakukan operasi pekat karena banyaknya PSK di daerah sekitar terminal, pun juga bertugas mengamankan tertib jalannya pemilu, dan kegiatan sosial masyarakat lainnya seperti pengamanan di tempat tempat perkawinan atau semacamnya (Wulan Kinasih & Joko Pramono, 2018). Penelitian M. Fauza Azima (2018). Pada Penelitian ini, dalam membina masyarakat linmas sudah efektif dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Dibuktikan dengan dibentuknya pos siskamling dan piket ronda keliling. Namun yang menjadi hambatan adalah masalah sumber daya dimana kurangnya personil linmas serta sarana dan prasarana dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk terus aktif dalam pengamanan desa (M. Fauza Azima 2018).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, Pada penelitian terdahulu dengan focus penelitian yang akan diteliti oleh penulis sangat berbeda dimana yaitu penulis melalui pendekatan penelitian kualitatif penulis akan mengoptimalkan

penanganan pra kejadian kriminal didesa serta mengurangi kejadian kriminal pasca kejadian melalui kesigapan lembaga pengaman desa. Hal kesigapan ini dipengaruhi oleh seringnya pemberdayaan yang dilakukan oleh instansi terkait kepada masyarakat guna meningkatkan kompetensi masyarakat terlebih lagi yang akan menjadi pengaman desa, kemudian penyadaran kepada masyarakat agar tingkat partisipasinya meningkat sehingga optimalisasi terhadap perlindungan masyarakat di desa akan semakin baik untuk terciptanya ketentraman dan ketertiban.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dialami pemerintah dalam menyelesaikan proses optimalisasi peran serta masyarakat pada satlinmas dalam menghadapi permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Takalar. Selain itu, untuk mengetahui upaya yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam satlinmas guna menyelesaikan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Takalar.

II. METODE

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian mulai dari merumuskan suatu rumusan masalah sampai pada kesimpulan untuk menghasilkan tujuan. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk menjelaskan alur dari proses penelitian ini melalui fakta empiris. Pendekatan kualitatif juga adalah pendekatan juga dikenal sebagai pendekatan survei karena biasanya peneliti mengumpulkan data melalui tatap muka dan interaksi dengan orang-orang di lokasi penelitian.

Adapun Basrowi dan Suwandi dalam Ulum (2017:43) mengatakan bahwa Penelitian kualitatif antara lain bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Schumacher dalam (Damaianti, 2006: 73) mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan investigatif karena dalam proses pengumpulan data dilakukan secara langsung dilapangan melalui tatap muka dan interaksi dengan individu.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena semua data yang diperoleh berupa wawancara dan hasil langsung secara tatap muka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian berdasarkan studi kasus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum menggunakan pendapat dari Bastian yang menyatakan bahwa optimalisasi dapat terjadi dengan menggunakan tiga dimensi, yaitu efisiensi, efektifitas, dan ekonomis. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Kendala yang dihadapi pada optimalisasi peran serta masyarakat dalam satlinmas

Permasalahan sering kali muncul pada berbagai kondisi dan situasi yang ada dimasyarakat sekarang ini karena sifat dari keadaan masyarakat yang heterogen sehingga sering kali terjadi kontradiksi antar masyarakat. Keadaan heterogen masyarakat ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal saja, melainkan ada pengaruh dari internal masyarakat itu pula. Para individu yang terbentuk sehingga menghasilkan suatu entitas kelompok yang disebut masyarakat, mempunyai peranan dalam entitas kelompok yakni saling bekerja sama untuk menghasilkan tatanan masyarakat yang baik.

Untuk menjelaskan kendala-kendala yang hadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana pembinaan Satlinmas untuk mengarahkan dan meningkatkan kompetensi satlinmas sebagai garda terdepan trantibum didesa/kelurahan karena tugas satlinmas sebagai penyelenggara ketentraman dan

ketertiban umum didesa/kelurahan sebagaimana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat pasal 27 ayat 1 dan 2 yang berisi tentang tugas linmas.

Keberhasilan peningkatan optimalisasi menurut Gabriel and Almond dapat ditentukan dengan melihat 2 dimensi yang selanjutnya dijelaskan penulis yakni:

1. Dimensi Efektivitas, dan
2. Dimensi Efisiensi .

Kemudian dalam menentukan keadaan tentram dan tertib menurut Ermaya Suradinata dapat ditentukan dengan melihat 2 faktor penentu yang sama, yakni Ketentraman dan Ketertiban itu sendiri. Maka setelah melaksanakan penelitian dengan real dilapangan berdasarkan 2 teori operasional yang dikemukakan, peneliti telah berhasil menemukan data dan fakta untuk menganalisis proses optimalisasi peran serta masyarakat dalam satlinmas guna meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Takalar dan disajikan dengan pembahasan dibawah. Selanjutnya setelah dianalisis maka akan di temui kendala apa saja yang dihadapi dalam proses optimalisasi peran serta masyarakat dalam satlinmas.

3.1.1. Efektivitas

Dari dimensi efektivitas ini penulis dapat menganalisis beberapa aspek yang terkandung didalamnya antara lain tujuan Program Satlinmas, hubungan antar instansi vertikal, proses pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, dan adaptasi pemetaan lingkungan/medan sehingga tujuan diharapkan bagaimana cara mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam satlinmas guna meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Takalar melalui cara-cara yang efektif. Sehingga peran serta masyarakat untuk satlinmas dapat berjalan secara baik. Proses efektivitas ini harus dilakukan secara terarah dan terukur untuk menjadikan tujuan optimalisasi peran serta masyarakat dalam satlinmas guna meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dapat tepat sasaran.

A. Tujuan Program Satlinmas

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja, dapat disimpulkan bahwa memang program Satlinmas sudah dibentuk agar jalannya tugas dan fungsi satlinmas dapat berjalan dengan jelas. Program dibuat secara menyeluruh dan umum kemudian program kerja tersebut selanjutnya di sosialisasikan kepada 100 kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Takalar untuk menyelenggarakan program linmas yang telah dibuat oleh Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja.

Pembentukan kader satuan perlindungan masyarakat yang bersumber dari sumber daya masyarakat itu sendiri. Untuk melegitimasi satlinmas yang ada di desa, maka pemerintah daerah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Perlindungan Masyarakat melakukan pemutakhiran data satlinmas di tiap desa/kelurahan. Sehingga terjadi konsep kerja yang jelas antar personil satlinmas.

Untuk merealisasikan tiap program kerja yang telah disusun maka bidang linmas melaksanakan berbagai upaya dalam perealisasi program agar program kerja dapat berjalan sesuai yang diharapkan dann target dapat dicapai. Satuan perlindungan masyarakat yang ada di kabupaten takalar sudah didata dan telah tersebar di semua kelurahan/desa, sehinga tidak ada lagi desa/kelurahan yang tidak mempunyai satlinmas. Satuan perlindungan masyarakat bersumber dari swadaya masyarakat itu sendiri sehingga satlinmas perlu di tingkatkan kapabilitasnya melalui peningkatan personil salah satunya.

B. Hubungan Antar Instansi Vertikal

Satuan Perlindungan Masyarakat yang sehari-hari berjalan terus menerus untuk melaksanakan kegiatan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dimasyarakat khususnya di masyarakat

desa/kelurahan diharapkan memiliki sumber daya personil yang baik agar proses untuk menjalankan ketentraman dan ketertiban umum dimasyarakat akan berjalan searah sesuai tujuan yang diharapkan. Selain itu pula tidak terjadinya tumpang tindih perihal koordinasi antar personil satlinmas di desa/kelurahan agar program kerja bisa berjalan searah dan terlaksana. Untuk meningkatkan sumber daya personil di lapangan tidak hanya penguatan internal antar personil satlinmas, diperlukan pula hubungan koordinasi dengan organisasi terkait dengan kondisi ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat.

Koordinasi antar instansi vertikal satlinmas memang perlu dilakukan untuk mempermudah kinerja dilapangan selain itu mempercepat proses penanganan kejadian dilapangan. Dari bentuk koordinasi yang telah dilakukan yakni bekerja sama dengan unsur dari satpol pp, kecamatan, tni, dan kepolisian. Untuk memperjelas arah koordinasi perlu ada program atau arah untuk koordinasi dengan instansi vertikal dimaksud.

C. Proses Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

Sumber daya manusia suatu organisasi dilihat dari kapabilitas anggota yang ada di organisasi tersebut. Mulai dari kecakapan anggota, tingkat responsibilitas terhadap pemecahan masalah, dan capaian terhadap program yang telah disusun, serta pencapaian tujuan organisasi. Untuk mewujudkan itu semua perlu adanya proses dalam peningkatan sumber daya manusia tersebut. Dimulai dari sosialisasi, proses rekrutmen, sampai proses kursus dasar terhadap anggota untuk meningkatkan pengetahuan tentang visi misi organisasi dan tupoksi dari masing anggota.

Satuan perlindungan masyarakat sebagai garda terdepan dalam penanganan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat diperlukan memiliki anggota yang memiliki tingkat kapabilitas terkait penanganan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk meningkatkan hal tersebut, diperlukan pembinaan terhadap anggota satlinmas di tiap desa/kelurahan agar kapabilitas personil.

Artinya bahwa proses pembinaan terhadap personil satlinmas telah dilakukan oleh Satpol pp sebagai penyelenggara dari satlinmas di tiap desa/kelurahan. Pembinaan yang dilakukan kepada satlinmas yang ada di 100 kelurahan/desa bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pengetahuan satlinmas untuk penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban agar semua desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Takalar dapat terjadi rasa tentram dan tertib.

D. Adaptasi Pemetaan Lingkungan/Medan

Kondisi geografis kadang mempengaruhi tingkat keberhasilan tugas di lapangan karena kendala dan hambatan datang dari mana saja. Kerumitan keadaan geografis suatu wilayah diperlukan analisis lebih dan tingkat pengetahuan penyelesaian masalah sehingga tujuan dari organisasi tidak terhambat dilapangan. Personil satlinmas pastinya sudah tau bagaimana kondisi geografis desa/kelurahan mereka. Namun kadang ada saja celah ditempat-tempat yang sulit untuk dijangkau dan bahkan belum pernah di singgahi dilapangan. Sehingga diperlukan pengetahuan yang baik bagi personil satlinmas melalui pemetaan medan.

3.1.2. Efisiensi

Efisiensi merupakan kemampuan atau cara untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dengan tanpa membuang banyak waktu, biaya serta tenaga. Penciptaan efisiensi ini dihasilkan dari perbandingan masukan dan pengeluaran suatu tugas dalam pengerjaannya. Hal ini berarti walaupun dengan sumber daya yang terbatas, pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan minimalisasi tenaga dan anggaran dengan cara memperbandingkan masukan dan pengeluaran. Pada dimensi efisiensi ini, penulis dapat mengukur bagaimana pencapaian peran serta masyarakat dalam satlinmas guna meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat melalui efisiensi sumber daya yang terbatas serta

minimalisasi waktu dan tenaga namun pencapaian tujuannya dapat tercapai pada optimalisasi peran serta masyarakat dalam satlinmas melalui beberapa indikator yang telah ditetapkan penulis antara lain manajemen sumber daya, sarana dan prasarana, anggaran, serta dukungan pemerintah.

A. Manajemen Sumber Daya

Dalam suatu organisasi pasti diharapkan memiliki anggota yang memiliki kapabilitas serta integritas yang baik demi tercapainya tujuan organisasi. suatu organisasi pastilah diisi oleh orang-orang yang berkompeten dibidangnya. Adapun ketika orang-orang itu masih minim terkait proses pencapaian organisasi, perlulah diberikan pelatihan dasar hingga kursus lanjutan untuk lebih meningkatkan kapabilitas serta kompetensi sumber daya manusia suatu organisasi.

Hal ini berhubungan pula dengan pencapaian tujuan demi meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dimasyarakat dimana peran serta masyarakat dalam satlinmas sebagai garda terdepan dalam keamanan di wilayah desa/kelurahan dapat tercapai apabila salah satunya seiring meningkatnya sumber daya personil dari satlinmas.

Setelah proses penyuluhan atau sosialisasi, pendidikan dasar meliputi pelatihan/kursus dasar. Selanjutnya tercipta personil yang siap diterjunkan kelapangan memiliki kompetensi kapabilitas yang baik.

Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat bahwa bentuk manajemen sumber daya dilakukan melalui pelatihan dan kursus selanjutnya para personil dibukukan keanggotaannya agar administrasi terhdap personil satlinmas jelas. Untuk lebih jelasnya ini dapat dilihat pada tabel data personil satlinmas di Kabupaten Takalar dibawah :

Data Rekapitulasi Jumlah Personil Satuan Perlindungan Masyarakat didesa/kelurahan Kabupaten Takalar Tahun 2021

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Total Jumlah Personil	Umur Rata-Rata
1.	Polongbangkeng Selatan	Bontokadatto, Bulukunyi, Cakura, Canrego, Lantang, Moncongkomba, Pa'bundukang, Pattene, Rajaya, Su'rulangi	137 Orang	41,6
2.	Polongbangkeng Utara	Barugayya, Kampung Beru, Ko'mara, Lassang, Malewang, Mannongkoki, Mattompodalle, Pa'rapunganta, Palleko, Panrannuangku, Parangbaddo, ParangLuara, Timbuseng, Towata, Massamaturu, Lassang Barat, Kale Ko'mara, Balangtanayya	262 Orang	46,1
3.	Pattallassang	Bajeng, Kallabirang, Maradekayya, Pallantikang, Pappa, Pattallassang, Sabintang, Sombala Bella	118 Orang	40,7
4.	Mappakasunggu	Pa'batangang, Soreang, Patani, Takalar Kota	44 Orang	48,3
5.	Mangarabombang	Banggae, Bontomanai, Bontoparang, Cikowang,	221 Orang	47

		Laikang, Lakatong, Lengcese, Mangadu, Payalakang, Pattopakang, Punaga, Topejawa		
6.	Sanrobone	Banyuanyara, Laguruda, Paddinging, Sanrobone, Tonasa, Ujung Baji	71 Orang	51
7.	Galesong Utara	Aeng Batu-batu, Bontolanra, Bontosunggu, Bontolebang, Pakkabba, Tamalate, Tamasaju, Sampulungan, Aeng Towa, Bontokadopepe	226 Orang	48,6
8.	Galesong Selatan	Baramamase, Bentang, Bontokassi, Bontomarannu, Bontokanang, Mangindara, Popo, Sawakong, Kadatong, Kalukubodo, Tarowang, Kale Bentang	148 Orang	41,6
9.	Galesong	Boddia, Bontoloe, Bontomangape, Galesong Baru, Galesong Kota, Parambambe, Kalenna, Pa'lalakkang, Para'sangang Beru, Pattinoang, Mappakalompo, Kalukuang, Parangmata, Campagayya	221 Orang	53
10.	Kepulauan Tanakeke	Balangdatu, Maccinibaji, Mattirobaji, Rewataya, Tompotana	44 Orang	44,6

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa rata-rata jumlah personil di semua kecamatan di Takalar di sesuaikan dengan jumlah per tiap desa/kelurahannya dimana dengan kecamatan yang memiliki banyak desa/kelurahan memiliki banyak pula jumlah personil satlinmas yakni Kecamatan Polongbangkeng Utara dengan total 262 orang dari 18 desa/kelurahan. Kemudian kecamatan dengan total jumlah personil paling sedikit yakni Kecamatan Mappakasunggu dengan total jumlah 44 orang personil dari 4 desa/kelurahan, dan Kecamatan Kepulauan Tanakeke dengan total 44 orang personil dari 5 desa. Kemudian untuk rata-rata umur keseluruhan pada kisaran 50 tahun dimana artinya personil satlinmas kebanyakan diisi oleh para orangtua bahkan lansia, hal ini perlu regenerasi oleh para pemuda dengan cara meningkatkan kesadaran akan ketentraman dan ketertiban desa/kelurahannya sehingga peran serta masyarakat untuk satlinmas meningkat agar desa/kelurahan tentram dan tertib.

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana diperlukan sebagai penunjang anggota dalam bekerja mencapai tujuan organisasi. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang kebanyakan bekerja dilapangan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat perlu memiliki sarana dan prasarana dalam penunjang tugas personilnya. Satlinmas di Kabupaten Takalar dimana tujuan dibentuknya satlinmas di Kabupaten Takalar demi menciptakan keadaan yang tentram dan tertib dimasyarakat diperlukan penunjang sarana dan prasarana baik itu yang diadakan secara kolektif oleh pemerintah daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja dan sumber daya dari tiap desa/kelurahan.

Untuk menunjang pengadaan sarana dan prasarana satlinmas dimana upaya dengan adanya sarana dan prasarana personil dapat dilihat oleh masyarakat desa sehingga tingkat kesadaran masyarakat untuk bergabung berperan serta sebagai personil satlinmas diharapkan tinggi dan masyarakat melihat bahwa memang sudah ada sarana dan prasarana satlinmas tersebut.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat bahwa pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana satlinmas melalui apbd yang diturunkan anggarannya di bidang linmas satpol pp lalu membantu desa kelurahan mengadakan sarana dan prasarana, selain sumber dari apbd di desa/kelurahan pun mengadakan secara sukarela sarana dan prasarana satlinmas mereka sehingga penunjang tupoksi dapat berjalan baik dan nyaman untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Takalar.

C. Anggaran

Akuntabilitas anggaran untuk efisiensi pelaksanaan tupoksi personil satlinmas digunakan untuk penunjang kegiatan satlinmas, anggaran yang diberikan dari apbd dan hibah dipergunakan untuk penunjang sarana dan prasarana serta penunjang kegiatan satlinmas.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Satlinmas bahwa pengadaan anggaran selain dari apbd pun juga dari dana hibah dari sumber daya personil serta dari pejabat desa/kelurahan setempat untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana personil juga untuk pelaksanaan kegiatan satlinmas seperti penyuluhan anggota untuk peningkatan peran serta masyarakat, pendidikan dan pelatihan bagian dari pembinaan kompetensi satlinmas.

D. Dukungan Pemerintah

Pemerintah sebagai pemegang kebijakan dimana sumber dari semua kebijakan dalam pelaksanaan organisasi merujuk pada keputusan pemerintah. Ketika kebijakan yang pemerintah ambil berdampak baik bagi organisasi maka proses pencapaian tujuan organisasi dapat berjalan pula dengan baik, begitupun sebaliknya. Sehingga diharapkan pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi untuk supaya organisasi berjalan dengan baik melalui dukungan yang dilakukan oleh pemerintah. Dukungan formil dan materil perlu dari sebuah organisasi yang diberikan oleh pemerintah, apalagi organisasi tersebut adalah organisasi pelayan publik (pemerintah) itu sendiri.

Satuan Perlindungan Masyarakat yang dibentuk dan dikomandoi langsung oleh pemerintah daerah yakni Satpol PP dan pemerintah wilayah yakni kecamatan pastinya segala sesuatunya bersumber dari pemerintah baik itu dari segi pengambilan kebijakan hingga segi pengadaan anggaran sebagai penunjang kegiatan satlinmas. Pemerintah daerah yang menangani masalah ketentraman dan ketertiban umum yakni Satuan Polisi Pamong Praja berperan penting dalam penunjang tugas-tugas satlinmas. Dalam pemberian fasilitas sampai pengadaan anggaran yang diturunkan dari pemerintah daerah untuk satlinmas dilakukan secara efisien guna pencapaian tujuan yang baik.

Berdasarkan wawancara serta data yang didapatkan penulis adapun selanjutnya penulis dapat menyimpulkan kendala yang dialami dalam pelaksanaan tugas fungsi satlinmas yakni:

1. Pelaksanaan tugas satlinmas di desa/kelurahan masih kekurangan sokongan anggaran dari daerah apalagi untuk memberikan penghargaan kepada personil satlinmas setidaknya memberikan insentif disetiap kegiatan yang dilakukan
2. Tumpang tindihnya organisasi dibuktikan dengan akan dibentuknya lembaga pengaman masyarakat, hal ini menyebabkan tupoksi satlinmas di alihkan ke lembaga perlindungan masyarakat sehingga tugas satlinmas seakan tidak ada lagi untuk mengatasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum di desa/kelurahan
3. Belum adanya seragam yang menjadi penanda bagi personil satlinmas untuk lebih eksis lagi dalam menjalankan tugasnya dilapangan

Dari kendala yang disebutkan diatas, penulis dapat menyimpulkan dengan keterkaitannya dengan optimalisasi satlinmas sebagaimana kendala yang dihadapi personil satlinmas masih bisa dikatakan sedikit dibandingkan dengan proses efektivitas serta efisiensi yang dilakukan dalam optimalisasi peran serta masyarakat dalam satlinmas. Namun dengan adanya kendala tersebut tidak menyurutkan semangat para personil untuk terus mengatasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Takalar.

3.2. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam satlinmas

Peran serta masyarakat dimana tingkat kesadaran masyarakat demi penacapaian tujuan organisasi sangatlah penting dari masing-masing individu masyarakat. Tujuan dengan aktifnya peran serta masyarakat selain untuk lebih mengakomodir pelaksanaan tugas organisasi menjadi lebih cepat dan mudah, pun juga untuk terciptanya regenerasi antar internal organisasi. Dalam satlinmas dimana kebanyakan personilnya telah lanjut usia diperlukan regenerasi dilihat dari peran serta masyarakat itu sendiri melalui peningkatan eksistensi satlinmas dengan cara memperbaiki kinerja organisasi dari tingkat internal organisasi satlinmas. Sehingga dengan cara lebih meningkatkan eksistensi satlinmas maka kacamata masyarakat akan terbuka untuk turut serta berperan aktif dalam proses penanganan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungannya.

Pemerintah sebagai fasilitator dalam mendukung kinerja organisasi dinilai penting untuk tercapainya tujuan yang diharapkan. Sebagaimana disampaikan oleh Siagian (2009: 142) bahwa pemerintah selaku pelopor, artinya bahwa dalam kehidupan bernegara pemerintah harus menjadi pelopor untuk masyarakat, sehingga sebagai pelopor utama maka pemerintah harus mampu menjadi panutan utama (rolemodel) untuk semua kalangan masyarakat. Hal ini menjadikan pemerintah sebagai garda terdepan dalam peningkatan kapasitas organisasi, apalagi organisasi satlinmas yang berada diwilayah administrasi pemerintahan.

Upaya yang dilakukan pemerintah seperti yang telah dijelaskan pada konsep optimalisasi sudah dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Takalar sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum pun juga sebagai pembina Satuan Perlindungan Masyarakat. Sehingga dengan adanya upaya yang dilakukan pemerintah maka peran serta masyarakat dalam satlinmas dapat meningkat untuk berpartisipasi dalam satlinmas.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah yakni berupa :

1. Pembinaan pelatihan dan pendidikan dasar bagi personil satlinmas dari 100 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Takalar yang setiap periode dilaksanakan di hotel Kota Makassar
2. Pengadaan sarana dan prasarana baik itu perlengkapan penunjang aktivitas satlinmas berupa pentungan, senter, dan pos kamling di semua desa/ kelurahan
3. Dukungan anggaran APBD yang diberikan langsung oleh pemerintah daerah kepada Bidang Perlindungan Masyarakat selanjutnya dianggarkan khusus untuk program satlinmas.
4. Proses administrasi anggota satlinmas yang sudah baik dilakukan dengan di daftarkannya semua personil satlinmas. Sehingga tanggung jawab para personil satlinmas sudah jelas.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah ini sebagai penunjang kinerja personil satlinmas yang diharapkan tercapainya tujuan yakni meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Takalar. Untuk mencapai tujuan tersebut upaya telah dilakukan kemudian penulis menentukan proses pencapain tujuan meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum lewat analisis teori yang telah dikemukakan oleh Ermaya Suradinata yakni :

1. Dimensi Ketentraman, dan
2. Dimensi Ketertiban

sehingga dapat dielaborasi dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Takalar.

3.2.1. Ketentraman

Kondisi sosial dimasyarakat yang heterogen, banyak mempengaruhi keadaan lingkungannya. Penciptaan keadaan yang tenang antar masyarakat yang heterogen menjadi harapan bagi seluruh masyarakat. Tugas untuk tercapainya harapan masyarakat yang tenang tentunya dibutuhkan dukungan dari internal yakni masyarakat sendiri maupun eksternal yakni dari pemerintah. Masyarakat secara umum wajib berperan aktif dalam pencapaian keadaan tenang di lingkungannya. Dalam tugas tugasnya dibentuklah Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai garda terdepan penciptaan keadaan tenang dimasyarakat. Untuk menjelaskan lebih lanjut terkait pencapaian ketentraman di Kabupaten Takalar terdapat beberapa indikator yang akan dijelaskan kemudian yaitu peningkatan kondusifitas, minimalisasi gangguan, penanganan bencana alam/nonalam, serta manajemen konflik.

Satuan Perlindungan Masyarakat dihadapkan pada keadaan dimana lingkungan masyarakat masih banyaknya kejadian yang mengganggu ketentraman dilingkungan masyarakat sehingga satlinmas hadir dalam mengatasi hal tersebut. Khususnya di Kabupaten Takalar yang diharapkan disemua lingkungan di Kabupaten Takalar tercipta keadaan yang tenang bagi masyarakatnya sehingga proses pembangunan pun dapat berjalan baik karena keadaan lingkungan dimasyarakat telah berjalan tenang.

A. Peningkatan Kondusifitas

Upaya dari masyarakat untuk meningkatkan kondusifitas yakni dari peran serta masyarakat itu sendiri dimana masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan kondusifitas dilingkungan mereka. Upaya dari masyarakat itu yakni seperti turut berperan aktif dalam Satuan Perlindungan Masyarakat. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) hadir sebagai lembaga penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di desa/kelurahan, tujuannya yakni termasuk meningkatkan kondusifitas di lingkungan desa/kelurahan Untuk meningkatkan kondusifitas dilingkungan desa/kelurahan satlinmas diperlukan.

Peningkatan kondusifitas yang dilakukan satlinmas di tiap desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Takalar dengan cara rutin melakukan kegiatan ronda/siskamling di lingkungan desa/kelurahan. Didukung dengan perlengkapan kebutuhan serta faktor lainnya bagi satlinmas itu sendiri untuk kelancaran tugas dilapangan. Namun dalam kenyataannya masih banyak sekali kekurangan yang dihadapi dilapangan.

B. Minimalisasi Gangguan

Selain didaerah perdesaan, didaerah kabupaten yang memiliki kondisi yang berbeda keteraturannya dibanding dikota, Kondisi pemerintahan dikabupaten yang kadang menjadi masalah sehingga menimbulkan konflik dimasyarakat. Sehingga untuk mengatasi hal itu semua maka dibentuklah Satuan Perlindungan Masyarakat yang berperan menangani gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Maka dari itu peran vital satlinmas disini sangat penting untuk meminimalisasi gangguan yang terjadi.

C. Penanganan Bencana Alam/Non Alam

Satuan Perlindungan Masyarakat sangat diharapkan sebagai garda terdepan penanganan gangguan ketentraman dimasyarakat. Dengan adanya satlinmas diupayakan diharapkan terjadi keadaan masyarakat yang kondusif tenang dan tertib. Untuk penanganan bencana alam dan non alam satlinmas juga sudah diberikan tugas sebagai penanganan pasca bencana.

Selain anggota tni dan polri, personil satpol pp dengan satlinmas juga turut serta membantu masyarakat yang menjadi korban banjir dengan melakukan evakuasi warga masyarakat yang terkena banjir dengan membuat rakit untuk warga masyarakat sebagai tindakan awal penanganan banjir. Untuk bencana non alam seperti kebakaran, personil pemadam kebakaran dari unsur bidang pemadam kebakaran satpol pp turun kelapangan untuk menangani kejadian kebakaran. Sebelum personil pemadam kebakaran tiba dilokasi, personil dari satlinmas yang terlebih dahulu ada dilokasi kejadian memadamkan api dengan pengetahuan dasar kebakaran yang diberikan saat pelatihan peningkatan kompetensi satlinmas. Sehingga langkah preventif awal dari penanganan kebakaran bisa teratasi dengan adanya personil satlinmas di masing-masing lokasi kejadian.

D. Manajemen Konflik

Masyarakat sebagai aktor dalam konflik yang terjadi sebagai katalisator (pemantik) pun juga sebagai stabilisator konflik. Masyarakat sebagai subjek dan objek dari konflik yang terjadi karena kehidupan sosial tak luput dari berbagai masalah yang ada. Maka dari itu masyarakat yang menangani konflik harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan menyelesaikan konflik yang terjadi. Disini masyarakat dipilih sebagai aktor stabilisator konflik yakni aparat penegak hukum diranah penegakan pasca konflik, juga dari pemerintahan yakni satuan polisi pamong praja yang memperbantukan satuan perlindungan masyarakat sebagai garda terdepan penyelesaian konflik dilingkungan masyarakat. masyarakat wajib menjaga lingkungan mereka dari ancaman konflik yang mengganggu ketentraman dan ketertertiban umum dilingkungan masyarakat dengancara aktif berpartisipasi dan turut serta dalam kegiatan satlinmas di masyarakat karena konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat sangat beragam.

3.2.2. Ketertiban

Keadaan ketertiban dimasyarakat sangat diharapkan untuk kondisi lingkungan masyarakat yang kondusif. Ketertiban sebagai hal yang berjalannya seiring dengan kondisi masyarakat yang dinamis. dimana masyarakat yang dinamis melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat lainnya dilapangan yang diharapkan keadaan yang tentram dan tertib. Ketertiban ditandai dengan adanya tanpa keadaan yang tanpa konflik dan kejadian mengganggu ketertiban lainnya.

Untuk mewujudkan ketertiban itu semua perlu hal yang dicapai yakni mewujudkan keteraturan dalam masyarakat dan membiasakan budaya adat dimasyarakat sehingga kolaborasi antar masyarakat dapat berjalan baik sehingga tidak terjadi kejadian yang mencederai ketertiban itu sendiri.

A. Keteraturan dalam Masyarakat

Keteraturan dalam masyarakat dianggap sebagai suatu kondisi dinamis dimana seluruh elemen kehidupan sosial berlangsung secara tertib sesuai dengan norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam kehidupan, sehingga tujuan sosial dapat menciptakan kemanfaatan bagi sebagian besar rakyat. Keteraturan dalam masyarakat adalah seperti kondisi interaksi sosial yang harmonis antara individu atau masyarakat, stabil dan teratur. Norma-norma sosial dimasyarakat harus dijaga agar tidak dicerai dengan perilaku masyarakat yang tidak pantas. Sehingga dengan adanya norma sosial masyarakat yang berjalan sebagaimana mestinya, keteraturan masyarakat dapat menjadi baik. Upaya perwujudan keteraturan dalam masyarakat diwujudkan terlebih dahulu melalui peningkatan kondisi psikologis masyarakat sebagai pondasi terciptanya keteraturan dimasyarakat.

B. Implementasi Kebiasaan/Adat di Masyarakat

Agar dapat diterima dalam sistem sosial, masyarakat akan berusaha melakukan perilaku yang sesuai dengan adat atau kebiasaan masyarakat. ketika ada orang yang kurang mengikuti adat

kebiasaan yang ada dimasyarakat maka orang tersebut biasanya kurang diindahkan oleh kelompok masyarakat yang lainnya. Karena kebiasaan merupakan keadaan perilaku yang dilakukan secara jangka panjang sehingga hal ini berulang dalam waktu yang lama. Adat istiadat ini diatur dalam kebiasaan tak tertulis yang mau tak mau harus dipatuhi masyarakat agar tidak adanya kecendrungan dalam bermasyarakat. Untuk menjadikan lingkungan yang kondusif aman dan tentram maka kebiasaan masyarakat yang buruk ditinggalkan sehingga masyarakat dapat membaaur dan menjadi masyarakat yang baik sehingga lingkungan dapat tentram dan tertib. Pencapaian kebiasaan adat masyarakat ini tak terlepas dari peran serta satuan perlindungan masyarakat sebagai garda terdepan penegakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

3.3 Diskusi Temuan Utama

Penelitian ini mempunyai temuan dimana kekurangan dalam pelaksanaannya yang pertama yakni menitikberatkan pada masalah anggaran karena kebutuhan personil satlinmas untuk pelaksanaan tugas mereka dilapangan perlu ditunjang dengan kebutuhan yang baik dari aspek sarana dan prasarana. Adapun untuk upaya yang dilakukan pemerintah meningkatkan peran serta masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam satlinmas adalah mengetahui terlebih dahulu upaya mengatasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Teori ketentraman dan ketertiban umum. Melalui keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Takalar yang melaksanakan pembinaan kepada satlinmas untuk penanganan konflik oleh satlinmas dilokasi terjadinya konflik, penanganan bencana alam/nonalam karena satlinmas pun juga mempunyai tugas demikian, minimal peningkatan kondusifitas dengan rutin melaksanakan ronda/siskamling diwaktu tertentu. Sehingga ini semuanya pada intinya adalah untuk juga meningkatkan eksistensi Satlinmas agar masyarakat dapat lebih berperan serta dalam satlinmas sehingga melahirkan regenerasi anggota satlinmas yang saat ini diisi lebih banyak oleh orang tua lanjut usia atau lansia. Dan diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberi semangat bagi para anak muda untuk turut serta ikut berperan aktif menjadi personel satlinmas di Kabupaten Takalar.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik lainnya dilapangan penulis menemukan fakta bahwa masih maraknya hal gangguan ketentraman dan ketertiban umum meskipun telah beberapa kali ditangani oleh satlinmas dan satpol pp. Kejadian yang terus berulang seperti minuman beralkohol, balapan liar yang sulit diminimalisir. Karena sikap partisipatif masyarakat yang kurang akan kesadaran ketentraman dan ketertiban umum diwilayahnya.

IV. KESIMPULAN

Penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya yang pertama yakni menitikberatkan pada masalah anggaran karena kebutuhan personil satlinmas untuk pelaksanaan tugas mereka dilapangan perlu ditunjang dengan kebutuhan yang baik dari aspek sarana dan prasarana mereka. Kedua, masyarakat melihat bahwa eksistensi satlinmas kurang karena bahkan dalam pengadaan baju seragam saja belum ada sehingga masyarakat belum tau keberadaan sesungguhnya satlinmas. Ketiga, segi penetapan struktur organisasi dan penetapan personil belum diperjelas bahkan kesannya masih tumpang tindih yang disebabkan kurangnya koordinasi antara pimpinan daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai yang bertanggung jawab untuk satlinmas. permasalahan demikian diketahui melalui teori optimalisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam satlinmas yakni Efektivitas dan Efisiensi yang dinilai penulis telah optimal dalam beberapa pelaksanaannya sehingga dapat diketahui kendala yang terjadi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Praja dan Pemadam Kebakaran serta Pemerintah Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- A.R, Syamsudin dan Vismaia S Damaianti. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Darmadi, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Fathoni, Abdurrahman. 2005. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Garut: Rieneka Cipta.
- Garner, Bryan A dan Henry Campbell. 2009. *Black's Law Dictionary*. St.Paul, MN: West.
- Hasan, M. Iqbal. 2009. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hotniar, Siringoringo. 2005. *Pemograman Linier: Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Gunung Agung.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press.
- Koentjaraningrat, Koentjoro. 2020. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kurniawan, Luthfi J. 2008. *Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik*. Jakarta: Intrans-MP3.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mannan, Bagir. 2001. *Perkembangan Pemikiran & Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Muh. 2017. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rao, Singiresu R. 2009. *Engineering Optimalization: Theory and Practice, Fourth Edition*. New Jersey: John Wiley and Sons Inc.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Soyomukti, Nurani. 2016. *Pengantar Sosiologi: Dasar Analisis, Teori & Pendekatan Menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial, & Kajian-Kajian Strategis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Suradinata, Ermaya. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Ramadhan.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siagian, Sondang. 2009. *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Syamsir, Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.

Sarundjang. 2002. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, Upaya Mengatasi Kegagalannya*. Yogyakarta: Andi Ofside.

Tjandra, W Riawan dkk. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.

Ulum, Muhammad Nahrul. 2017. *Kontribusi Retribusi Izin Gangguan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung Provinsi Jawa Barat*. Jatinangor: IPDN.

Waluyo. 2002. *Pribadi, Peran serta Masyarakat Dalam Kehidupan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Winardi 1991. *Marketing Dan Perilaku Konsumen*. Bandung: Mundur Maju.

Yusuf, A.Muri. 2014. *Metode Penelitian : Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Indonesia, 2014.

_____. *Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan*. Indonesia, 2018.

_____. *Peraturan Pemerintah Nomer 16 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja*. Indonesia, 2018.

Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat*. Indonesia, 2020.

_____. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat*. Indonesia, 2014.

Gubernur Sulawesi Selatan. *Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomer 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat*. Indonesia, 2021.

Bupati Takalar. *Peraturan Bupati Nomer 49 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamomg Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Takalar*. Indonesia, 2016.

Azima, M Fauzan. 2018. *Peran Lembaga Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana (Studi di Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Kinasih, Wulan dan Joko Pramono. 2018. *Optimalisasi Peran Satlinmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta*. PUBLISIA Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 3 Nomer 1. Universitas Slamet Riyadi.

Nalle, Victor Imanuel W. 2016. *Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 47 Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saladin, Tomy. 2019. *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pemberi Hak Tanggungan Yang Bukan Debitur..* Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Volume 2 Nomer 2. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati.

Tarigan, Danaria dkk. 2020. *Persepsi Masyarakat dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM) Volume 2 Nomor 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Teori dan Indikator Pembangunan. <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-dan-indikator-pembangunan-12>

Teori Partisipasi : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Menurut Para Ahli.
[https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-](https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan)
Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar. <https://takalarkab.bps.go>

